

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sudah mengembangkan inovasi mengenai kewenangan pemerintah terhadap pengelolaan keuangan telah memberikan kita wawasan yang baru. Sistem pengelolaan keuangan yang sekarang terpisah disebabkan oleh banyaknya wilayah yang memekarkan dirinya sehingga terbentuklah wilayah baru sehingga sistematis pemerintah pun mengalami perubahan seperti halnya yang terjadi di Dinas Perhubungan Jawa Barat.

Pada dasarnya laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban suatu instansi, hal itu dikarenakan laporan keuangan yang dijadikan sebagai bahan gambaran keluar masuknya peristiwa yang terjadi pada laporan keuangan berdasarkan transaksi-transaksi yang terjadi mengenai keuangan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai salah satu alat informasi yang diperuntukan bagi pihak pemerintah sebagai bahan mengambil kebijakan dan keputusan. Selain itu dijadikan pula sebagai alat informasi untuk pihak luar instansi tersebut seperti untuk masyarakat, para investor, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan lain-lain. Kepentingan pengguna laporan berbeda, sesuai dengan yang dibutuhkan.

Laporan keuangan berfungsi juga sebagai bahan untuk mengambil keputusan tentang capaian dari kinerja-kinerja yang diprogramkan serta

kegiatan yang ditargetkan untuk realisasi dari pendapatan, realisasi dari penyerapan belanja serta realisasi dari penyerapan pembiayaan.

Anggaran dalam ruang lingkup sektor publik merupakan hal yang paling diandalkan pada keberlangsungan berjalannya roda pemerintahan. Maka pemerintah pun dinilai harus memiliki usaha untuk mencari dan menggali sumber dana nya sendiri yang pada dasarnya sumber dana tersebut berasal dari potensi daerah yang dimiliki dan kemudian dikelola dan dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini tersajikan dalam UU No. 33 tahun 2004 yang kemudian direvisi dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. UU tersebut menjelaskan mengenai daerah otonom yang diberikan hak dan kewajiban nya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya berdasarkan kepentingan masyarakat didaerahnya. Selain itu pada UU No. 33 tahun 2004 terdapat misi utama yang menyatakan bahwa otonomi daerah tersebut yang lebih penting adalah efektivitas dari sumber daya keuangannya itu sendiri.

Laporan keuangan yang ada dalam suatu instansi dijadikan sebagai salah satu alat informasi yang sangat bermanfaat karena dapat disampaikan dengan relevan apabila disajikan dengan menggunakan sistem yang tepat, oleh karena itu sangat cocok apabila dimanfaatkan sebagai salah satu dari bentuk akuntabilitas.

Selain itu penilaian dari kinerja juga sangat penting untuk dijadikan sebagai bagian dari akuntabilitas pemerintah daerah untuk menunjukkan kemampuannya

dalam mengelola keuangan daerah. Didalam akuntabilitas tidak hanya sekedar menunjukkan proses dibelanjakannya uang public, tetapi menunjukkan kemampuan bahwa uang publik dibelanjakan oleh Negara dengan menggunakan prinsip ekonomis, efektif dan efisien.

Laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan memiliki peran penting. Secara sederhananya apabila disandingkan dengan neraca, maka laporan realisasi anggaran memiliki prioritas yang lebih penting sehingga laporan realisasi anggaran disajikan lebih dulu sebelum laporan neraca, laporan operasional, dan lain-lain didalam laporan keuangan.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Dinas Perhubungan Jawa Barat) merupakan salah satu instansi dibawah naungan Provinsi Jawa Barat yang memberikan pelayanan berupa pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, diantaranya transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian. Sebagai salah satu instansi pemerintah, Dinas Perhubungan Jawa Barat memiliki kewajiban memberikan pertanggung jawaban secara finansial kepada pemerintah daerah serta masyarakat sebagai pengguna jasa. Dengan adanya hal itu, perlu adanya suatu pengukuran kinerja dengan dilihat dari aspek finansial yang merupakan pilihan tepat sebagai alat ukur untuk menilai kinerja serta prestasi suatu instansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun target dan realisasi anggaran di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, yaitu:

Tabel 1.1**Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2014 - 2018**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2014	430.415.200.497	255.482.016.402	59%
2015	284.792.781.899	226.643.826.915	79%
2016	123.003.831.445	98.222.429.835	79%
2017	304.094.614.392	252.498.240.296	83%
2018	219.717.981.304	171.407.995.374	78%

Sumber : LRA Dinas perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 - 2018

Dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Dinas Perhubungan Jawa Barat mengalami fluktuatif pada tahun 2014. Dan rasio efektivitasnya sebagai berikut:

Tabel 1.2**Rasio Efektivitas Realisasi Anggaran Tahun 2014-2018**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2014	1.221.700.000	1.363.728.245	111%	Sangat Efektif
2015	1.379.908.655	1.487.932.411	107%	Sangat Efektif
2016	1.539.647.650	1.732.059.030	112%	Sangat Efektif
2017	1.984.821.500	2.053.988.820	103%	Sangat Efektif
2018	1.613.182.200	1.920.205.870	119%	Sangat Efektif

Sumber: LRA Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018
(diolah oleh peneliti)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas laporan realisasi anggaran dinas perhubungan provinsi Jawa Barat (Dinas Perhubungan Jawa Barat) bahwa dari tahun 2014 sampai tahun 2018 Dinas Perhubungan Jawa Barat menempati kriteria “Sangat Efektif” dengan rasio efektivitas lebih dari 100% akan tetapi mengalami fluktuatif dengan dimulai pada tahun 2014 rasio efektivitasnya 111% kemudian turun di tahun 2015 dengan rasio 107% kemudian naik lagi di tahun 2016 dengan rasio 112% kemudian turun lagi di tahun 2017 dengan rasio 103% dan naik lagi di tahun 2018 dengan rasio 119%.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merasa perlu adanya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, yang kemudian dituangkan dalam judul skripsi yang berjudul **“Efektivitas Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (2014-2018)”**

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dihadapi terkait efektivitas realisasi anggaran di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, adalah:

1. Realisasi anggaran di Dinas Perhubungan Jawa Barat tahun anggaran 2014-2018 dinilai sangat efektif akan tetapi masih fluktuatif.
2. Adanya upaya untuk mempertahankan realisasi anggaran di Dinas Perhubungan Jawa Barat.

3. Adanya faktor pendukung dan penghambat dalam mempertahankan efektivitas realisasi anggaran Dinas Perhubungan Jawa Barat.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan fokus masalah di atas adalah :

1. Bagaimana upaya untuk mempertahankan efektivitas realisasi anggaran di Dinas Perhubungan provinsi Jawa Barat?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mempertahankan efektivitas realisasi anggaran di Dinas Perhubungan Jawa Barat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya mempertahankan efektivitas realisasi anggaran di Dinas Perhubungan provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung penghambat dalam mempertahankan efektivitas realisasi anggaran Dinas Perhubungan Jawa Barat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk memperluas pengetahuan serta pengalaman dan kemampuan untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah peneliti pelajari selama kuliah di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Manfaat Praktis, peneliti berharap hasil dari penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan pengambilan keputusan dan juga untuk menyumbangkan pemikiran yang bermanfaat terkait dengan masalah tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

F. Kerangka Pemikiran

Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig dalam Harbani Pasolong (2007:7) berpendapat bahwa administrasi publik adalah pemerintah pusat dan daerah melakukan kegiatan dalam rangka melaksanakan kekuasaan politiknya. Maksud dari kekuasaan politik disini bisa didapatkan dari sistem demokrasi dan juga sistem warisan seperti halnya di kerajaan.

Pada dasarnya pemerintah daerah menerima pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat agar roda pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien juga laporan keuangan sebagai salah satu alat dari akuntabilitas dari pemerintah daerah itu sendiri.

Laporan realisasi anggaran memberikan gambaran mengenai perbandingan antara anggaran yang ada dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan realisasi anggaran dibuat bertujuan untuk memebrikan informasi mengenai realisasi dan anggaran dalam pelaporannya sehingga dapat terlihat ketercapaian target-target yang telah ditentukan sebelumnya.

Akuntansi pemerintah diatur dalam peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang disajikan berdasarkan PSAP No. 02 yang menjelaskan tentang laporan realisasi anggaran dengan struktur pelaporannya.

Laporan realisasi anggaran yang transparansi akan menjadikan informasi dari laporan tersebut bermanfaat guna menilai kinerja dari keuangan daerah tersebut. Tujuan dari realisasi anggaran tersebut akan efektif apabila disertai dengan faktor pendukungnya, seperti yang dikutip dari Mahmudi (2011:22) bahwa efektivitas (hasil guna) merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Maka, Pricewaterhouse Cooper (PwC) dalam jurnal Donny Maha Putra dan Sudarto (2019:221) memberikan dimensi dari efektivitas, diantaranya:

1. *Policies* (Kebijakan)

Indikator dari dimensi ini diantaranya:

- a. Menyesuaikan aturan dan regulasi keuangan yang ada
- b. Mendokumentasikan kebijakan akuntansi
- c. Mengembangkan bimbingan dan manual komprehensif

2. *Processes* (Proses)

Indikator dari dimensi ini diantaranya:

- a. Mengelola periode transisi dan pemantauan
- b. Memeriksa kualitas data selama proses perbaikan/pembaharuan
- c. Merancang prosedur kontrol kualitas
- d. Menyiapkan prosedur pengumpulan data

3. *People* (Sumber daya manusia)

Indikator dari dimensi ini diantaranya:

- a. Inspirasi perubahan mentalitas dan perubahan budaya
- b. Memastikan komitmen politik, meningkatkan kualitas staff dan kesadaran publik
- c. Membangun keahlian akuntan sektor publik
- d. Mengembangkan program pelatihan dan mengizinkan transfer pengetahuan

4. *Systems* (Sistem)

Indikator dari dimensi ini antara lain:

- a. Menyesuaikan IT yang ada dan/atau mengembangkan solusi IT baru
- b. Menerjemahkan/menjelaskan proses organisasi ke lingkungan IT.

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.1
Pola Kerangka Pemikiran

G. Proposisi

Proposisi adalah dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena yang terjadi. Maka proposisi untuk penelitian ini adalah:

Diduga terdapat upaya untuk mempertahankan efektivitas realisasi anggaran di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

